

# LAPORAN EVALUASI INTERNAL

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETK



**TW IV**

**2025**

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL TRIWULAN III TAHUN 2025**

Pada hari Kamis tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mohamad Kashuri. S.Si. Apt. M.Farm  
NIP : 19730630 200003 1 001  
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Nama : Dra. Rustyawati. Apt. M.Kes.Epid.  
NIP : 19660909 199303 2 002  
Jabatan : Ketua Tim Evaluasi Internal

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran, capaian output dan capaian kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik periode 2 Januari sampai 31 Desember tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

**A. Pihak- Pihak yang Terlibat dalam Evaluasi Internal**

Evaluasi internal Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik TW IV tahun 2025 telah dilakukan sebanyak tiga kali terdiri dari:

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan Januari s.d. Oktober dilaksanakan pada hari Senin tanggal lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan Januari s.d. November dilaksanakan pada hari Kamis tanggal delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan Januari s.d. Desember dilaksanakan pada hari Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

Pelaksanaan evaluasi internal melibatkan perwakilan tiap unit teknis di lingkungan Kedeputan 2 yang menjadi tim evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kedeputan 2. Surat Keputusan dan daftar hadir rapat evaluasi terlampir pada notulen rapat evaluasi internal (**Lampiran**).

**B. Alokasi, realisasi, capaian kinerja dan anggaran per output per bulan dalam triwulan yang bersangkutan**

Pada periode triwulan IV tahun 2025, capaian kinerja (Program/ Kegiatan/ Output) dan realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**C. Capaian program dan kegiatan beserta identifikasi kendala/hambatan atas pencapaian target**

No	Program/Kegiatan/Output	Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut
1	3165. BDC Pemantauan produk	tidak ada kendala Pelaksanaan KIE dilakukan sesuai dengan koordinasi dengan TA	Pelaksanaan KIE
2	3165. BKB Pemantauan produk		
<b>3</b>	<b>DR. 4119 Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan</b>		
3.1	4119.BAH.001 Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Jumlah permohonan yang terus meningkat dan jumlahnya tidak dapat dikendalikan karena layanan publik tetap harus dilaksanakan. Efisiensi anggaran yang membatasi untuk melakukan inspeksi langsung	penyelesaian dokumen permohonan Sertifikasi dan SKE/SKE/SAS dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik
3.2	4119.BDI.001 Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
3.3	4119.BDI.002 Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
3.4	4119.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Terjadi efisiensi anggaran, pada tahun 2025 terdapat pembatasan surat edaran deputi terkait kategorisasi temuan iklan dan penandaan yaitu TMK minor harus ditindaklanjuti, sehingga meningkatkan jumlah TMK yang harus ditindaklanjuti	Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait temuan TMK Minor
3.5	4119.BIC.001 UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
3.6	4119.BIC.002 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	Tidak ada kendala	
3.7	4119.QDG.001 Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
3.8	4119.QDG.002 Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
3.9	4119.QDG.003 Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
<b>4</b>	<b>DR. 4121 Pengawasan Kosmetik</b>		
4.1	4121.BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah permohonan yang terus meningkat dan tidak dapat dikendalikan jumlahnya. adanya efisiensi anggaran	Melaksanakan audit sertifikasi sarana dan evaluasi permohonan sertifikasi produk. Peningkatan kompetensi bagi petugas dan pelaku usaha
4.2	4121.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan prioritas tidak dapat terlaksana. anggaran yang tersedia hanya untuk kegiatan pemeriksaan rutin dan intensifikasi pengawasan	Melaksanakan intensifikasi pengawasan
4.3	4121.BIC.001 Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
4.4	4121.BIC.002 Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
4.5	4121.QDI.001 Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
4.6	4121.QDI.002 BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
<b>5</b>	<b>DR. 4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>		

No	Program/Kegiatan/Output	Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut
5.1	4128.BAH.001 Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	Adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada TW 1 yaitu pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi berbasis online	1. Melaksanakan kegiatan FKP Pelayanan Publik Tahun 2025 2. Pengelolaan pengaduan 3. Pemeliharaan sarana prasarana yanblik 4. Peningkatan kompetensi SDM 5. Pelaksanaan kegiatan penguatan implementasi RB melalui Survey Analisis Dampak Inovasi Yanblik 6. Pelaksanaan penyempurnaan aplikasi registrasi berbasis online
5.2	4128.BIA.001 Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	1. Efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan join audit DIP bersama UPT tidak terlaksana. 2. Rendahnya komitmen pelaku usaha dalam penyediaan DIP di sarana	1. Bimbingan teknis penyusunan DIP kepada pelaku usaha 2. Intensifikasi Penilaian DIP secara daring
5.3	4128.PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	1. Berkas permohonan registrasi dan notifikasi yang selalu meningkat namun tidak diimbangi dengan alokasi sumber daya manusia (SDM) 2. Aplikasi yang ada seringkali mengalami kendala bug error sehingga menghambat penyelesaian berkas. 3. Tambah data berulang akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA dan SK, serta Notifikasi Kosmetik secara rutin 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock/ stock opname/ crash program
5.4	4128.QDB.001 Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	1. Perbedaan latar belakang dan jangkauan wilayah pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik 2. Efisiensi anggaran menyebabkan keterbatasan pendampingan secara luring	Meningkatkan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal, misalnya asosiasi pelaku usaha
<b>6</b>	<b>DR. 4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>		
6.1	4129.ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	Tidak ada kendala atau hambatan	
6.2	4129.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	proses pengadaan menunggu kepastian penghematan anggaran tahap II	Akan dilaksanakan pada TW II
6.3	4129.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	proses pengadaan menunggu kepastian penghematan anggaran tahap II	Akan dilaksanakan pada TW II
6.4	4129.PFA.001 Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun		
6.5	4129.PFA.002 Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	Kegiatan tidak terlaksana karena seluruh anggaran terblokir	-
<b>7</b>	<b>DR. 6385 PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>		
7.1	6385.BAH.001 Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	
7.2	6385.BDC.001 Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	Tidak ada kendala dan hambatan	
7.3	6385.QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	Tidak ada kendala dan hambatan	
7.4	6385.UBA.002 Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran	

**D. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran per bulan dalam Triwulan IV Tahun 2025.**

1) Capaian rencana aksi perjanjian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran untuk masing- masing sasaran kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional.Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada periode akhir Triwulan IV Tahun 2025 dirangkum pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja sd Oktober Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd November Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd Desember Tahun 2025			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 0-1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	71.41	109.86%	3,582,245,500	18.074.816	0,50%	65	70.95	109.16	3,582,245,500	35.859.599	1,00%	65	65.73	101.13	3,582,245,500	50.574.018	100%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	86.7	127.50%	2,569,919,500	18.074.816	0,70%	68	89.90	132.21	2,569,919,500	35.859.599	1,40%	68	83.25	122.42	2,569,919,500	50.574.018	100%
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	62	71.14	114.74%	3,552,695,000	243.143.044	6,84%	62	69.29	111.76	3,552,695,000	275.862.744	7,76%	62	73.71	118.88	3,552,695,000	415.997.615	100%
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam	83				4.000.000.000	1.586.729.471					39,67%	1.586.729.471					4.000.000.000	1.586.729.471	100%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan.Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83	84.78	102.14%	902,584,000	3165000	0,35%	83	83.77	100.93	902,584,000	7,694,700	0,85%	83	84.16	101.40	902,584,000	32248700	100%
		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	86	77.27	89.85%	354,341,000	7715556	2,18%	86	81.01	94.20	354,341,000	26231339	7,40%	86	78.43	91.20	354,341,000	35395758	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja sd Oktober Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd November Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd Desember Tahun 2025			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	85	76.92	90.49%	354,341,000	7715556	2.18%	85	83.33	98.04	354,341,000	26231339	7.40%	85	72.73	85.56	354,341,000	35395758	100%
		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	81	69.04	85.23%	1,694,533,000	74.472.724	4.39%	81	62.14	76.71	1,694,533,000	116.015.224	6,85%	81	67.55	83.39	1,694,533,000	149.079.246	100%
		Persentase Fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	70	76.87	109.81%	354,341,000	7715556	2.18%	70	76.82	109.74	354,341,000	26231339	7.40%	70	78.08	111.55	354,341,000	35395758	100%
		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89	89	96.03	107.90%	354,341,000	7715556	2.18%	89	97.54	109.60	354,341,000	2623133	0,74%	89	94.94	106.67	354,341,000	35395758	100%
		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	78	69.22	88.74%	957,720,000	74.472.724	7,78%	78	67.07	85.99	957,720,000	116.015.224	12,11%	78	68.13	87.34	957,720,000	149.079.246	100%
		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	69.85	89.55%	500,130,000	7715556	1,54%	78	67.45	86.48	500,130,000	26231339	5,24%	78	69.18	88.69	500,130,000	35395758	100%
		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	83.96	96.51%	500,130,000	7715556	1,54%	87	82.12	94.39	500,130,000	26231339	5,24%	87	82.77	95.14	500,130,000	35395758	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja sd Oktober Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd November Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd Desember Tahun 2025			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71	71	60.06	84.59%	931,538,000	7,745.000	0,83%	71	74.46	104.87	931,538,000	7.745.000	0,83%	71	60.52	85.24	931,538,000	7.745.000	100%
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT. SK. Kos	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2				1,000,000,000	0					1,000,000,000	0					1,000,000,000	0	
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87				5,226,369,000	0					5,226,369,000	0					5,226,369,000	0	
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51	41.50	45.21	106.38%	7,028,831,000	0		41.50	45.40	109.39	7,028,831,000	0		41.50	45.15	108.80	7,028,831,000	0	
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60	10	10.67	106.07	4,964,569,000	192.346.818	3,87%				4,964,569,000	192.346.818	3,87%	3	3.11	103.70	4,964,569,000	192.346.818	3100%
		Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34	Diukur akhir tahun			1,100,000,000	0	0,00%	Diukur akhir tahun			1,100,000,000	0	0,00%	Diukur akhir tahun			1,100,000,000	0	
5	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam. Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.7	Diukur akhir tahun			8,760,036,000	456.020.693	5,21%	Diukur akhir tahun			8,760,036,000	753.955.109	8,61%	Diukur akhir tahun			8,760,036,000	3.187.687.045	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target akhir tahun	Realisasi Kinerja sd Oktober Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd November Tahun 2025			Anggaran (Rp)			Realisasi kinerja sd Desember Tahun 2025			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
6	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT. SK. dan Kos	89.96	Diukur akhir tahun			1,538,957,950	57.553.773	3,74%	Diukur akhir tahun			1,538,957,950	50.255.396	3,27%	Diukur akhir tahun			0	771.650.037	0
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT. SK. dan Kos	81.66	Diukur akhir tahun			304,760,600	469.899.626	154,19%	Diukur akhir tahun			304,760,600	635.933.243	208,67%	Diukur akhir tahun			304,760,600	722.882.086	237,20%
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT. SK. dan Kos	5	Diukur akhir tahun			960,170,500	38.887.899	4,05%	Diukur akhir tahun			960,170,500	41.981.226	4,37%	Diukur akhir tahun			960,170,500	89.789.307	9,35%
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT. SK. dan Kos	2.95	Diukur akhir tahun			425,419,950	41.692.624	9,80%	Diukur akhir tahun			425,419,950	45.559.283	10,71%	Diukur akhir tahun			425,419,950	759.174.884	178,45%

## 2) Kendala Hambatan Justifikasi Rekomendasi

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
1	<b>Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu</b>	<p>1. Capaian Sampling (82,62%) Capaian Uji sebesar (71,08%), capaian ini secara nasional sudah terpenuhi</p> <p>2. Berikut temuan TMS OBA: Cemar Mikroba (5,01%), Farmasetik (3,37%), Mengandung BKO (1,85%), TIE (1,44%)</p> <p>3. TMK Penandaan mengalami peningkatan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan</p> <p>2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu</p>
2	<b>Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu</b>	<p>1. Capaian Sampling (83,03%) Capaian Uji sebesar (75,84%) capaian ini secara nasional sudah terpenuhi</p> <p>2. Rincian temuan TMS SK: TMS kadar Vitamin (5,33%), TIE (1,12%), Farmasetik (1,12%), Cemar Mikroba (0,28%), BKO (0,28%)</p> <p>3. Capaian kinerja tidak dapat disimpulkan karena UPT belum sepenuhnya melakukan sampling pada sampel SK yang beresiko dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SK risiko tinggi biasanya SK impor ilegal yg harganya mahal (melebihi harga sampel pd RAB)</li> <li>-SK impor ilegal kebanyakan beredar di sarana online sehingga perlu penambahan alokasi sampel online utk</li> <li>- SK loka dgn Riwayat TMS biasanya diproduksi oleh IF/IOT kecil dan tidak beredar di seluruh wilayah</li> </ul>	<p>1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan</p> <p>2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk SK tidak aman dan bermutu</p>

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
3	<b>Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu</b>	<p>Capaian Sampling : 13.994 (80,87%)                      Capaian Pengujian : 11.695 (67,59%)                      MS : 11.428 produk (97,72%)                      TMS : 267 produk (2,28%)                      TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang : 125 produk (1,07%), kemudian TMS kedua terbanyak cemaran mikroba 100 produk (0,86%).                      TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang adalah kosmetik dengan sistem kontrak produksi, dimana ditemukan pelanggaran pihak yang tidak memiliki kewenangan melakukan produksi kosmetik yang ditambahkan bahan berbahaya/dilarang. Terdapat keterlibatan pihak pemilik merek dalam produksi kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang.                      TMS kedua terbanyak (cemaran mikroba) disebabkan antara lain karena industri kosmetik menggunakan bahan baku adalah bahan alam; tidak menerapkan aspek CPKB secara konsisten, terutama terkait aspek sanitasi higiene; serta penyimpanan produk ruahan dengan masa tunggu yang lama</p> <p>TMK Penandaan terbanyak yaitu pencantuman klaim perlu data dukung (8.97%) dan klaim dilarang (5.85%)</p> <p>3. TMK Penandaan dengan temuan klaim perlu data dukung dan klaim dilarang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan.</p> <p>4. TMK Penandaan dengan temuan klaim dilarang banyak ditemukan untuk produk yang mencantumkan klaim yang tidak diperbolehkan pada kosmetik dan mencantumkan klaim tidak mengandung nama bahan (ingredient) yang diperbolehkan dalam kosmetik, contoh: Paraben.</p>	Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang TMK

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
4	<b>Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	Tidak ada kendala	
5	<b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</b>	1. Penggunaan free tool bulk opener sebagai solusi untuk membuka seluruh link sekaligus cukup membantu mempercepat proses membuka link temuan iklan, namun tetap membutuhkan pengecekan manual untuk memastikan apakah takedown iklan telah dilakukan	Peningkatan koordinasi dengan stake holder

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
6	<b>Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan</b>	<p>1. Dari target pemeriksaan 313 Sarana, terdapat 212 yang telah selesai diinspeksi atau setara 67%.</p> <p>2. Temuan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi OBA periode Januari s/d September 2025 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Sertifikat CPOBAB tidak berlaku (43,55%)</li><li>-Sanitasi dan Higiene (19,35%)</li><li>-Penerapan CPOBAB (16,13%)</li></ul> <p>3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah (1) tingginya sertifikat CPOTB yang tidak diperpanjang, (2) UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK. terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi OBA dibawah 70%. UPT BPOM dengan capaian 0%</p>	<p>1. Monev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi OBA untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja.</p> <p>2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA</p>

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
7	<b>Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan</b>	<p>1. Dari target pemeriksaan 55 Sarana, terdapat 28 yang telah selesai diinspeksi atau setara 50%.</p> <p>2. Temuan Hasi Pemeriksaan Sarana Produksi SK periode Januari s/d September 2025 yaitu Penerapan CPOBAB yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK.</p> <p>4. Terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi SK dibawah 70%. UPT BPOM dengan capaian 0%</p>	<p>1. Monev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi SK untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja.</p> <p>2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA</p>

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
8	<b>Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan</b>	<p>1. Dari target pemeriksaan 266 sarana, terdapat 260 sarana telah diperiksa (97,7%).</p> <p>2. Sarana TMK didominasi oleh temuan ketidaksesuaian CPKB (59,5%), kosmetik TIE (36,5%), dan kosmetik mengandung BB (4,0%).</p> <p>3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 81% dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah industri kosmetik semakin meningkat dan kurang diimbangi dengan pemahaman dan konsistensi pelaku usaha terhadap regulasi, terutama penerapan CPKB.</li><li>- Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, sehingga cakupan pemeriksaan sarana menjadi lebih luas dan menysasar sarana yang beresiko tinggi.</li><li>- Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran).</li><li>- Perlu dilakukan reuiu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Perlu dilakukan reuiu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).</li></ul>

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
9	<b>Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan</b>	Dari target 1834 sarana, terdapat 1021 sarana telah diperiksa (55,67%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan OBA TIE (15,38%), OBA BKO (5,92%), OBA Kedaluwarsa (1,70%), TMK Penandaan (0,52%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan dan Mutu (0,22%), Tidak memiliki catatan pembelian/penjualan/kartu stok dan Tanpa SKI (0,07%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 75,74% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan ilegal di sarana distribusi

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
10	<b>Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan</b>	Dari target 949 sarana, terdapat 718 sarana telah diperiksa (75,66%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan SK TIE (2,23%), SK Kedaluwarsa (1,67%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan (1,39%) dan TMK Penandaan (0,28%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 94,43% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan ilegal di sarana distribusi

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
11	<p><b>Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan</b></p>	<p>1. Dari target pemeriksaan 4.660 Sarana, terdapat 3.732 yang telah selesai diinspeksi atau setara 80%.</p> <p>2. Sarana TMK didominasi oleh adanya temuan kosmetik TIE sebanyak 73%. Temuan yang lainnya yaitu mengandung bahan dilarang (16%) dan kosmetik kedaluwarsa (11%).</p> <p>3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 78% dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Berdasarkan data hasil pengawasan hingga bulan September 2025, jenis sarana dengan jumlah TMK terbesar adalah pengecer (73%).</li> <li>- Mayoritas pengecer kosmetik adalah pelaku usaha UMK dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih rendah dan aktivitas yang dilakukan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dasar perekonomian keluarga.</li> <li>- Di samping itu, pelaku usaha kosmetik semakin meningkat karena usaha kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan bagi masyarakat namun banyak pelaku usaha yang belum paham regulasi.</li> <li>- Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, yang menargetkan pemeriksaan dilakukan terhadap sarana yang diduga beresiko tinggi melakukan pelanggaran, termasuk target tim penindakan. Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran).</li> </ul>	<p>Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang belum mencapai target</p>

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
12	<b>Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan</b>	<p>1. Pelaku usaha UMKM lebih sering melakukan klaim berlebihan karena dianggap dapat meningkatkan penjualan, meski melanggar aturan. Mereka cenderung beranggapan lebih baik meminta maaf daripada izin, yang menyulitkan pengawasan dan penerapan regulasi.</p> <p>2. Penyiaran lokal sangat bergantung pada pendapatan iklan, khususnya iklan obat bahan alam. Larangan ketat terhadap iklan ini dapat mengancam pendapatan radio, dimana saat ini dalam kondisi sulit, sehingga mereka cenderung mengabaikan regulasi demi menjaga pendapatan.</p>	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
13	<b>Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan</b>	<p>Industri besar seperti produsen suplemen kesehatan, biasa sering menggunakan jasa eksternal seperti influencer untuk mengiklankan produknya. Namun influencer kerap beriklan dengan klaim berlebihan, karena kurangnya literasi terkait regulasi iklan OBAOKSK.</p> <p>Industri besar juga cenderung beriklan secara intens dan kreatif, sehingga sering kali tidak mendaftarkan persetujuan iklan produknya sebelum dipublikasi, mengingat proses pendaftaran yang memakan waktu. Hal ini menyebabkan iklan yang sudah beredar tidak sesuai ketentuan.</p>	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK
14	<b>Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan</b>	Pelaku usaha masih banyak membuat iklan dengan mencantumkan klaim klaim dilarang yang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman		
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	tidak ada kendala	
T	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Tidak ada kendala	Meningkatkan kegiatan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA dan SK kepada peneliti
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Tidak ada kendala	Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik
19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh		

No	Indikator	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi
20	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini		
21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Tidak ada rekomendasi TW III	
22	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala	Peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi pada beberapa area, seperti efektivitas tata kelola, perbaikan sistem layanan publik, serta optimalisasi peran sumber daya manusia.
23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala	Monitoring pelaksanaan SAKIP sesuai dengan pedoman
24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	<p>1. Belum diterapkannya sistem CMS secara penuh karena beberapa hal salah satunya adalah saldo kas bendahara yang tidak mencukupi karena masih proses revolving sehingga pengeluaran ditanggung oleh PJK menggunakan sistem reimburse.</p> <p>2. Terjadinya perubahan prioritas kegiatan sehingga realisasi TUP tidak sama dengan pengajuan TUP</p> <p>3. Masih adanya gap realisasi dan perencanaan anggaran karena kurang cermat dalam menyusun RPD</p>	<p>1. Koordinasi lebih intensif dengan pihak yang menangani pengelolaan kas yaitu antara BPP, BP dan PPSPM.</p> <p>2. Monev intensif terhadap realisasi anggaran</p> <p>3. Revisi RPD setiap akhir triwulan</p> <p>4. Koordinasi dan monev intensif antara seluruh pengelola keuangan dalam melaksanakan pertanggungjawaban TUP</p>
25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Penentuan risiko yang diangkat di level BPOM	<p>1. Pembahasan risiko dengan Deputi</p> <p>2. Pembahasan risiko dengan internal tim SPI</p>

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Evaluasi Internal,



Anisyah, S.Si, Apt, MP

Jakarta, 7 Januari 2026

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik,



Mohamad Kashuri. S.Si. Apt. M.Farm

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Rincian capaian anggaran per bulan pada Triwulan IV (Juli s.d. S) Tahun 2025**

**1. Bulan Juli**

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025**

Per Program; Kegiatan;

Periode Juli 2025

Kementerian : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Unit Organisasi : 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Satuan Kerja : 445161 **DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>15,695,965,000</b>	<b>2,748,000</b>	<b>7,230,935,663</b>	<b>2,103,653,896</b>	<b>9,334,589,559</b>	<b>59.47 %</b>	<b>6,358,627,441</b>
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan	15,695,965,000	2,748,000	7,230,935,663	2,103,653,896	9,334,589,559	59.47 %	6,358,627,441
DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,682,557,000	0	1,641,601,631	176,487,181	1,818,088,812	67.77 %	864,468,188
DR.4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	2,168,071,000	2,748,000	1,031,140,477	343,272,526	1,374,413,003	63.39 %	790,909,997
DR.4121 Pengawasan Kosmetik	2,273,244,000	0	1,124,727,832	252,266,639	1,376,994,471	60.57 %	896,249,529
DR.4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,479,947,000	0	1,111,248,249	330,588,991	1,441,837,240	58.14 %	1,038,109,760
DR.4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,700,000,000	0	1,479,485,396	651,288,127	2,130,773,523	57.59 %	1,569,226,477
DR.6385 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	2,392,146,000	0	842,732,078	349,750,432	1,192,482,510	49.85 %	1,199,663,490

2. Bulan Agustus

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025**

Per Program; Kegiatan;

Periode Agustus 2025

Kementerian : 063 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Unit Organisasi 01 **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Satuan Kerja : 445161 **DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>15,695,965,000</b>	<b>2,748,000</b>	<b>9,334,589,559</b>	<b>1,401,178,902</b>	<b>10,735,768,461</b>	<b>68.40 %</b>	<b>4,957,448,539</b>
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan	15,695,965,000	2,748,000	9,334,589,559	1,401,178,902	10,735,768,461	68.40 %	4,957,448,539
DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,682,557,000	0	1,818,088,812	103,208,118	1,921,296,930	71.62 %	761,260,070
DR.4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	2,168,071,000	2,748,000	1,374,413,003	97,233,680	1,471,646,683	67.88 %	693,676,317
DR.4121 Pengawasan Kosmetik	2,273,244,000	0	1,376,994,471	195,104,979	1,572,099,450	69.16 %	701,144,550
DR.4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,479,947,000	0	1,441,837,240	123,159,679	1,564,996,919	63.11 %	914,950,081
DR.4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,700,000,000	0	2,130,773,523	221,420,910	2,352,194,433	63.57 %	1,347,805,567
DR.6385 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	2,392,146,000	0	1,192,482,510	661,051,536	1,853,534,046	77.48 %	538,611,954

3. Bulan September

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025**

Per Program; Kegiatan;

Periode September 2025

**Kementerian : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**Unit Organisasi 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**Satuan Kerja : 445161 DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>15,695,965,000</b>	<b>2,748,000</b>	<b>10,735,768,461</b>	<b>1,056,109,433</b>	<b>11,791,877,894</b>	<b>75.13 %</b>	<b>3,901,339,106</b>
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan	15,695,965,000	2,748,000	10,735,768,461	1,056,109,433	11,791,877,894	75.13 %	3,901,339,106
DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,682,557,000	0	1,921,296,930	110,794,967	2,032,091,897	75.75 %	650,465,103
DR.4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	2,168,071,000	2,748,000	1,471,646,683	200,171,674	1,671,818,357	77.11 %	493,504,643
DR.4121 Pengawasan Kosmetik	2,273,244,000	0	1,572,099,450	117,834,264	1,689,933,714	74.34 %	583,310,286
DR.4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,479,947,000	0	1,564,996,919	266,436,214	1,831,433,133	73.85 %	648,513,867
DR.4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,700,000,000	0	2,352,194,433	247,781,119	2,599,975,552	70.27 %	1,100,024,448
DR.6385 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	2,392,146,000	0	1,853,534,046	113,091,195	1,966,625,241	82.21 %	425,520,759

**Lampiran 2. Lembar Kerja Monitoring Capaian Kinerja Organisasi TW IV Tahun 2025**

**Pembahasan dan Diskusi:** Capaian indikator Triwulan II tahun 2025, Aksi Tindak Lanjut TW Sebelumnya, Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut. Hingga rapat penyusunan laporan internal. terdapat 13 (tiga belas) Indikator kinerja yang dapat diukur. Berikut ini hasil capaian Indikator yang dimaksud. Berikut merupakan matriks pembahasan masing-masing IKU tersebut yang mencakup realisasi bulan Januari. Februari dan Maret 2025; perhitungan capaian TW 1; kendala dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Kertas Kerja Capaian ( link akses <https://bit.ly/capaiandeputi2tahun2025>)



2. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II (<https://bit.ly/TindakLanjutCapaianKinerjaDitwasOTSK>)

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Sampling (82,62%) Capaian Uji sebesar (71,08%), capaian ini secara nasional sudah terpenuhi</li> <li>2. Berikut temuan TMS OBA: Cemaran Mikroba (5,01%), Farmasetik (3,37%), Mengandung BKO (1,85%), TIE (1,44%)</li> <li>3. TMK Penandaan mengalami peningkatan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan</li> <li>2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu</li> </ol>	s/d TW 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT</li> </ol> <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum komunikasi kepada pelaku usaha terkait dispensasi kemasan</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi terhadap 75 pelaku usaha dengan riwayat temuan penandaan berulang</li> <li>3. Kegiatan Progresif untuk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang penandaannya TMK pada tanggal 20-21 Agustus 2025</li> <li>4. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha</li> <li>5. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya</li> </ol>	<p>Penandaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan terhadap pelaku usaha yang masih ditemukan pelanggaran penandaan berulang secara berkala</li> <li>2. Kelanjutan kegiatan Progresif untuk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang penandaannya TMK</li> </ol> <p>1. Penyusunan juknis penanganan cemaran mikrobiologi pada OBA</p>	<p>Penandaan:</p> <p>s/d TW 4</p>	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana aksi yang belum selesai		Timeline		
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori tidak dapat disimpulkan	<p>1. Capaian Sampling (83,03%) Capaian Uji sebesar (75,84%) capaian ini secara nasional sudah terpenuhi</p> <p>2. Rincian temuan TMS SK: TMS kadar Vitamin (5,33%), TIE (1,12%), Farmasetik (1,12%), Cemar Mikroba (0,28%), BKO (0,28%)</p> <p>3. Capaian kinerja tidak dapat disimpulkan karena UPT belum sepenuhnya melakukan sampling pada sampel SK yang beresiko dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-SK risiko tinggi biasanya SK impor ilegal yg harganya mahal (melebihi harga sampel pd RAB)</li> <li>-SK impor ilegal kebanyakan beredar di sarana online sehingga perlu penambahan alokasi sampel online utk</li> <li>- SK loka dgn Riwayat TMS biasanya diproduksi oleh IF/IOT kecil dan tidak beredar di seluruh wilayah</li> </ul>	<p>1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan</p> <p>2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk SK tidak aman dan bermutu</p>	s/d TW 4	<p><b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</b></p> <p>1. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT</p> <p><b>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk SK TMS</b></p> <p>1. Forum komunikasi kepada pelaku usaha terkait dispensasi kemasan</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi terhadap 75 pelaku usaha dengan riwayat temuan penandaan berulang</p> <p>3. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha</p> <p>4. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya</p>	<p>1. Desk dengan UPT yang belum menemukan produk TMS di wilayahnya untuk penajaman teknis metode sampling targeted</p> <p>Penandaan:</p> <p>1. Pemantauan terhadap pelaku usaha yang masih ditemukan pelanggaran penandaan berulang secara berkala</p> <p>2. Kelanjutan kegiatan Progresif untuk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha yang penandaannya TMK</p>	Penandaan: s/d TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana aksi yang belum selesai		Timeline		
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori tidak dapat disimpulkan	<p>Capaian Sampling : 13.994 (80,87%)</p> <p>Capaian Pengujian : 11.695 (67,59%)</p> <p>MS : 11.428 produk (97,72%)</p> <p>TMS : 267 produk (2,28%)</p> <p>TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang : 125 produk (1,07%), kemudian TMS kedua terbanyak cemaran mikroba 100 produk (0,86%).</p> <p>TMS terbanyak bahan berbahaya/dilarang adalah kosmetik dengan sistem kontrak produksi, dimana ditemukan pelanggaran pihak yang tidak memiliki kewenangan melakukan produksi kosmetik yang ditambahkan bahan berbahaya/dilarang. Terdapat keterlibatan pihak pemilik merek dalam produksi kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang.</p> <p>TMS kedua terbanyak (cemaran mikroba) disebabkan antara lain karena industri kosmetik menggunakan bahan baku adalah bahan alam; tidak menerapkan aspek CPKB secara konsisten, terutama terkait aspek sanitasi higiene; serta penyimpanan produk ruahan dengan masa tunggu yang lama</p> <p>TMK Penandaan terbanyak yaitu pencantuman klaim perlu data dukung (8,97%) dan klaim dilarang (5,85%)</p> <p>3. TMK Penandaan dengan temuan klaim perlu data dukung dan klaim dilarang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan.</p> <p>4. TMK Penandaan dengan temuan klaim dilarang banyak ditemukan untuk produk yang mencantumkan klaim yang tidak diperbolehkan pada kosmetik dan mencantumkan klaim tidak mengandung nama bahan (ingredient) yang diperbolehkan</p>	Melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang TMK	TW 4	<p><b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</b></p> <p>1. Monitoring pelaksanaan sampling dan pengujian di bulan Juli</p> <p><b>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk Kosmetik TMS</b></p> <p>1. Melakukan desk kepada UPT yang capaian sampling pengujiannya dan tingkat kesesuaiannya masih rendah</p>	<p>Pembinaan industri kosmetik oleh UPT setempat dan Ditwasos untuk produk2 dengan hasil uji cemaran mikroba</p> <p>Monev UPT TW III untuk mempercepat sampling pengujian, terutama pengujian kosmetik</p> <p>Bimtek kepada pelaku usaha secara berkala terkait penandaan kosmetik</p>	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			dalam kosmetik, contoh: Paraben.						
4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Capaian kinerja diukur pada akhir tahun	Tidak ada kendala			-			

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana aksi yang belum selesai		Timeline		
5	<b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</b>	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik	1. Penggunaan free tool bulk opener sebagai solusi untuk membuka seluruh link sekaligus cukup membantu mempercepat proses membuka link temuan iklan, namun tetap membutuhkan pengecekan manual untuk memastikan apakah takedown iklan telah dilakukan	Peningkatan koordinasi dengan stake holder	TW IV	1. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, IdEA, platform e-commerce dan lintas sektor lainnya agar dapat menindaklanjuti rekomendasi iklan yang tidak memenuhi ketentuan 2. Sharing regulasi dengan pemangku kepentingan lain sehingga bisa saling memahami ketentuan di masing-masing instansi melalui Forum Komunikasi Pengawasan Iklan Bersama BBPOM di Palembang dan KPID Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juli 2025 (Nota Dinas Nomor PW.02.03.43.07.25.394 tanggal 18 Juli 2025) 3. Direktorat Pengawasan OTSK telah melakukan rapat koordinasi dengan platform Shopee, dalam rangka menindaklanjuti salah satu temuan produk tidak memenuhi ketentuan dan pemantauan progress implementasi program INTERAKSI (Input Nomor Izin Edar BPOM Ketika Promosi), pada 22 Juli 2025	1. Forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk dapat membahas tantangan pengawasan 2. Pembuatan tools untuk memverifikasi secara otomatis terkait rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor sehingga monitoring tindak lanjut dapat lebih efisien 3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, IdEA, platform e-commerce dan lintas sektor lainnya agar dapat menindaklanjuti rekomendasi iklan yang tidak memenuhi ketentuan 4. Monitoring rekoemndasi lintas sektor yang sudah ditindaklanjuti	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana aksi yang belum selesai		Timeline		
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Capaian kinerja belum mencapai target triwulan dengan kategori cukup	<p>1. Dari target pemeriksaan 313 Sarana, terdapat 212 yang telah selesai diinspeksi atau setara 67%.</p> <p>2. Temuan Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi OBA periode Januari s/d September 2025 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sertifikat CPOBAB tidak berlaku (43,55%)</li> <li>-Sanitasi dan Higiene (19,35%)</li> <li>-Penerapan CPOBAB (16,13%)</li> </ul> <p>3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah (1) tingginya sertifikat CPOTB yang tidak diperpanjang, (2) UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK.</p> <p>terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi OBA dibawah 70%. UPT BPOM dengan capaian 0%</p>	<p>1. Monev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi OBA untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja.</p> <p>2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA</p>	TW IV	<b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan dengan UPT setiap triwulan (TW II dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025)</b>	<p>1. Berkoordinasi dengan UPT BPOM di wilayah setempat untuk melakukan pendampingan kepada sarana produksi agar proses sertifikasi CPOTB dapat segera diselesaikan.</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan bagi inspektur terkait penyusunan laporan hasil inspeksi, termasuk pengelompokan dan pengkategorian temuan (Critical, Major, dan Minor).</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan UPT BPOM untuk mempercepat realisasi pengawasan sarana produksi OBA dan SK.</p> <p>4. Forum koordinasi kepada pelaku usaha</p>	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Capaian kinerja belum mencapai target triwulan dengan kategori cukup	<p>1. Dari target pemeriksaan 55 Sarana, terdapat 28 yang telah selesai diinspeksi atau setara 50%.</p> <p>2. Temuan Hasi Pemeriksaan Sarana Produksi SK periode Januari s/d September 2025 yaitu Penerapan CPOBAB yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>3. Penyebab tingginya TMK CPOTB adalah UPT BPOM belum optimal dalam mengelompokkan hasil temuan inspeksi menjadi kategori mayor, minor, dan kritikal secara sistematis, sehingga berpengaruh terhadap penetapan kesimpulan hasil pengawasan MK/TMK.</p> <p>4. Terdapat 29 UPT dengan capaian hasil pengawasan sarana produksi SK dibawah</p>	<p>1. Monev kinerja UPT Triwulan III difokuskan pada pengawasan sarana produksi SK untuk menindaklanjuti permasalahan capaian kinerja.</p> <p>2. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA</p>	TW IV	<b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan dengan UPT setiap triwulan (TW II dilakukan tanggal 11 Juli 2025)</b>	<p>1. Melaksanakan pelatihan bagi inspektur terkait penyusunan laporan hasil inspeksi, termasuk pengelompokan dan pengkategorian temuan (Critical, Major, dan Minor).</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan UPT BPOM untuk mempercepat realisasi pengawasan sarana produksi OBA dan SK.</p> <p>3. Forum koordinasi kepada pelaku usaha</p>	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			70%. UPT BPOM dengan capaian 0%						
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Capaian kinerja belum mencapai target triwulan dengan kategori cukup	<p>1. Dari target pemeriksaan 266 sarana, terdapat 260 sarana telah diperiksa (97,7%).</p> <p>2. Sarana TMK didominasi oleh temuan ketidaksesuaian CPKB (59,5%), kosmetik TIE (36,5%), dan kosmetik mengandung BB (4,0%).</p> <p>3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 81% dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah industri kosmetik semakin meningkat dan kurang diimbangi dengan pemahaman dan konsistensi pelaku usaha terhadap regulasi, terutama penerapan CPKB.</li> <li>- Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, sehingga cakupan pemeriksaan sarana menjadi lebih luas dan menasar sarana yang beresiko tinggi.</li> <li>- Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran).</li> <li>- Perlu dilakukan reuiu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).</li> </ul>	*Perlu dilakukan reuiu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor).	TW 4	<b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</b>	Melakukan movev UPT terkait pelaksanaan tindak lanjut Melakukan reuiu terhadap pengkategorian temuan ketidaksesuaian CPKB (mayor dan minor) pada hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan dan sosialisasi kepada petugas UPT untuk persamaan persepsi dalam penerapan pengkategorian temuan.	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik	Dari target 1834 sarana, terdapat 1021 sarana telah diperiksa (55,67%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan OBA TIE (15,38%), OBA BKO (5,92%), OBA Kedaluwarsa (1,70%), TMK Penandaan (0,52%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan dan Mutu (0,22%), Tidak memiliki catatan pembelian/penjualan/kartu stok dan Tanpa SKI (0,07%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 75,74% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	TW IV	<b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan dengan UPT setiap triwulan (TW II dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025)</b>	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	TW IV	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik	Dari target 949 sarana, terdapat 718 sarana telah diperiksa (75,66%) 2. Sarana TMK didominasi oleh temuan SK TIE (2,23%), SK Kedaluwarsa (1,67%), Cara Penyimpanan tidak sesuai ketentuan (1,39%) dan TMK Penandaan (0,28%) 3. Jumlah sarana yang MK sebesar 94,43% melebihi target yang ditetapkan	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	TW IV	<b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan dengan UPT setiap triwulan (TW II dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025)</b>	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan Ilegal di sarana distribusi	TW IV	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Capain kinerja belum mencapai target triwulan dengan kategori baik	<p>1. Dari target pemeriksaan 4.660 Sarana, terdapat 3.732 yang telah selesai diinspeksi atau setara 80%.</p> <p>2. Sarana TMK didominasi oleh adanya temuan kosmetik TIE sebanyak 73%. Temuan yang lainnya yaitu mengandung bahan dilarang (16%) dan kosmetik kedaluwarsa (11%).</p> <p>3. Jumlah sarana yang MK tidak mencapai target 78% dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan data hasil pengawasan hingga bulan September 2025, jenis sarana dengan jumlah TMK terbesar adalah pengecer (73%).</li> <li>- Mayoritas pengecer kosmetik adalah pelaku usaha UMK dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi masih rendah dan aktivitas yang dilakukan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dasar perekonomian keluarga.</li> <li>- Di samping itu, pelaku usaha kosmetik semakin meningkat karena usaha kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan bagi masyarakat namun banyak pelaku usaha yang belum paham regulasi.</li> <li>- Adanya kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025, yang menargetkan pemeriksaan dilakukan terhadap sarana yang diduga beresiko tinggi melakukan pelanggaran, termasuk target tim penindakan.</li> </ul> <p>Penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran).</p>	Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang belum mencapai target	TW 4	<p><b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</b></p> <p>1. Melakukan pertemuan pembahasan monev capaian IKU bersama UPT untuk meminta UPT agar mengintensifkan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.</p> <p>2. Melakukan monitoring realisasi pencapaian target IKU hingga TW III 2025 untuk dilakukan usulan penyesuaian target apabila gap capaian signifikan.</p>	Melakukan pembinaan terhadap sarana yang menjadi target pemeriksaan (jika anggaran tersedia), atau Melakukan pemilihan target sarana berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya yang pernah dilakukan supervisi regulasi/ pembinaan. Melakukan pemeriksaan pada bulan November/ Desember untuk memenuhi target terhadap sarana yang telah diintervensi sebagaimana di atas.	TW IV	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana aksi yang belum selesai		Timeline		
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	<b>Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik</b>	<p>1. Pelaku usaha UMKM lebih sering melakukan klaim berlebihan karena dianggap dapat meningkatkan penjualan, meski melanggar aturan. Mereka cenderung beranggapan lebih baik meminta maaf daripada izin, yang menyulitkan pengawasan dan penerapan regulasi.</p> <p>2. Penyiaran lokal sangat bergantung pada pendapatan iklan, khususnya iklan obat bahan alam. Larangan ketat terhadap iklan ini dapat mengancam pendapatan radio, dimana saat ini dalam kondisi sulit, sehingga mereka cenderung mengabaikan regulasi demi menjaga pendapatan.</p>	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	TW IV	<p><b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</b></p> <p>1. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT .</p> <p>2. Melakukan monitoring realisasi pencapaian target IKU hingga TW III 2025</p> <p>3. Forum pengawasan iklan bersama UPT dalam rangka efektivitas pengawasan iklan di media penyiaran lokal di Palembang tanggal 15 Juli 2025</p> <p><b>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan iklan</b></p> <p>1. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha tanggal 20-21 Agustus 2025 secara luring dan daring</p> <p>2. Pembinaan teknis kepada pelaku usaha</p>	<p>1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha</p> <p>2. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha</p>	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	<b>Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik</b>	<p>Industri besar seperti produsen suplemen kesehatan, biasa sering menggunakan jasa eksternal seperti influencer untuk mengiklankan produknya. Namun influencer kerap beriklan dengan klaim berlebihan, karena kurangnya literasi terkait regulasi iklan OBAOKSK.</p> <p>Industri besar juga cenderung beriklan secara intens dan kreatif, sehingga sering kali tidak mendaftarkan persetujuan iklan produknya sebelum dipublikasi, mengingat proses pendaftaran yang memakan waktu. Hal ini menyebabkan iklan yang sudah beredar tidak sesuai ketentuan.</p>	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	TW IV	<p><b>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</b></p> <p>1. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT .</p> <p>2. Melakukan monitoring realisasi pencapaian target IKU hingga TW III 2025</p> <p>3. Forum pengawasan iklan bersama UPT dalam rangka efektivitas pengawasan iklan di media penyiaran lokal di Palembang tanggal 15 Juli 2025</p> <p><b>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan iklan</b></p> <p>1. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha tanggal 20-21 Agustus 2025 secara luring dan daring.</p> <p>2. Pembinaan teknis kepada pelaku usaha</p>	<p>1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha</p> <p>2. Desk Progresif untuk percepatan tindak lanjut pelanggaran iklan oleh pelaku usaha</p>	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik	Pelaku usaha masih banyak membuat iklan dengan mencantumkan klaim klaim dilarang yang disebabkan oleh banyaknya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam rangka marketing/penjualan.	malakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan iklan yang TMK	TW 4	Melakukan monitoring realisasi pencapaian target IKU hingga TW III 2025	Melakukan monitoring realisasi pencapaian target sampling iklan per jenis media Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait iklan kosmetik	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	Belum dilakukan pengukuran karena anggaran blokir							
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Capaian kinerja diukur pada akhir tahun	tidak ada kendala						
T	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik	Tidak ada kendala	Meningkatkan kegiatan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA dan SK kepada peneliti	TW IV	Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik/uji klinik pada tanggal 25 - 26 Septemebr 2025	1. Pelaksanaan webinar uji praklinik/klinik 2. Desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik lebih intensif	TW IV	Tercapainya target indikator pada akhir tahun
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Capaian kinerja telah mencapai target triwulan dengan kategori sangat baik	Tidak ada kendala	Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik	TW IV	Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik TW III tanggal 16 September 2025	Pelaksanaan monev fasilitator TW IV di bulan Npvenber	TW IV	Tercapainya target indikator pada akhir tahun
19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	Belum dilakukan pengukuran karena anggaran blokir							
20	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	Belum dilakukan pengukuran karena anggaran blokir							
21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Capaian kinerja diukur diakhir tahun	Tidak ada rekomendasi TW III						

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
22	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Capaian kinerja diukur diakhir tahun	Tidak ada kendala	Peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi pada beberapa area, seperti efektivitas tata kelola, perbaikan sistem layanan publik, serta optimalisasi peran sumber daya manusia.	TW IV	<p>Semua unit sudah dilakukan desk dan penilaian oleh TPI (Inspektorat) dengan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dit. Pengawasan Kosmetik lolos menuju WBBM</li> <li>2. Dit. PMPU OT, SK, Kos lolos WBK</li> <li>3. Dit. Reg OT, SK, Kos dan Dit Was OTSK tidak lolos pengajuan WBBM</li> <li>4. Dit Standard OT,SK,Kos tidak menjadi prioritas penilaian karena WBK &lt; 1 thn</li> </ol> <p>Berikut persiapan yang telah dilakukan untuk penilaian TPN (Kemenpan)</p> <p>A. Dit. Pengawasan Kosmetik yang lolos menuju WBBM telah melakukan beberapa hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah menyusun Matriks Rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik yang telah diserahkan ke Inspektorat</li> <li>2. Pedoman penanganan isu viral kosmetik telah disahkan dalam bentuk SOP Mikro POM-08.02/CFM.01/SOP.01/IK.44.02 tentang Penanganan Berita Viral Kosmetik</li> <li>3. Melakukan penyesuaian materi presentasi implementasi ZI di Ditwaskos dengan penajaman evaluasi dampak inovasi yang dirasakan oleh masyarakat sampai pada level outcome (in progress)</li> <li>4. Tetap melakukan pemantauan terhadap nilai IPP IPAK setiap bulan dan implementasi ZI pada setiap kelompok kerja</li> <li>5. Telah melakukan FKP pada tanggal 12 Agustus 2025 yang melibatkan lintas sektor, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, akademisi, dan media massa</li> <li>6. Telah tersedia video testimoni dari stakeholder (lintas sektor, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, akademisi, internal BPOM)</li> <li>7. Tetap melakukan monev</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan survei SPKP dan SPAK setiap bulan</li> <li>2. Melakukan pemantauan terhadap WBS setiap bulan</li> <li>3. Melaksanakan pengelolaan pengaduan setiap bulan</li> <li>4. Melakukan pemantauan disiplin pegawai setiap bulan</li> <li>5. Hasil LHE Dit. Registrasi OTSKK dan Dit. Pengawasan OTSKK sudah keluar, selanjutnya akan dilakukan desk konsultasi oleh masing-masing unit</li> </ol>	TW IV	Tercapainya target indikator kinerja pada akhir tahun berjalan

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						<p>terhadap pelaporan oleh influencer</p> <p>8. Telah melakukan pendampingan dengan Inspektorat dalam rangka persiapan wawancara oleh Kemenpan RB</p> <p>n</p> <p>B. Dit. PMPU OT, SK, Kos yang lolos WBK telah melakukan beberapa hal, antara lain:</p> <p>1. Telah dilaksanakan verifikasi lapangan evaluasi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) pada tanggal 15-16 Juli 2025;</p> <p>2. Verifikasi lapangan dilakukan oleh tim TPI Mandiri (inspektorat I) dan perwakilan Kemenpan RB (3 orang) sebagai observer;</p> <p>3. Hasil verifikasi lapangan:</p> <p>a) Pendalaman Inovasi yang berdampak yaitu Program Orang Tua Angkat (POTA), Laporan POTA (PDCA) dan tim TPI Mandiri melakukan konfirmasi kepada anak angkat terkait dampak POTA (zoom meeting);</p> <p>b) Pelayanan publik yang dipermudah dan kunjungan ke loket;</p> <p>c) Pengawasan: WBS, Benturan Kepentingan, Gratifikasi dan pelaporannya;</p> <p>d) Program AOC dan dampak pada unit kerja;</p> <p>e) Random sampling kepada pegawai terkait pembangunan zona integritas di unit kerja;</p> <p>4. Pada tanggal 4-8 Agustus 2025 TPI Mandiri melaksanakan validasi kepada responden yang melakukan pengisian SPKP dan SPAK bulan Februari-April 2025</p>			

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
23	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Capaian kinerja diukur diakhir tahun	Tidak ada kendala	Monitoring pelaksanaan SAKIP sesuai dengan pedoman		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Unit Kerja di Kedepetian II</li> <li>2. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.</li> <li>3. *Mempublikasikan Laporan Kinerja Interim dan Tahunan pada subsite Unit Kerja di Kedepetian II</li> <li>4. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan evaluasi kinerja terkait implementasi SAKIP</li> </ol>	Melakukan simulasi perbandingan Capaian tahun berjalan 2025 dengan capaian tahun 2024	TW 4	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan dan target indikator tercapai sampai dengan akhir tahun
24	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	<p>Capaian kinerja diukur diakhir tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kas oleh Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya optimal (belum full mekanisme CMS)</li> <li>2. Pengelolaan TUP masih belum sesuai ketentuan (pertanggungjawaban TUP tidak sesuai dengan yang direncanakan)</li> <li>3. Realisasi anggaran masih belum sesuai dengan RPD yang telah ditentukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum diterapkannya sistem CMS secara penuh karena beberapa hal salah satunya adalah saldo kas bendahara yang tidak mencukupi karena masih proses revolving sehingga pengeluaran ditanggung oleh PJK menggunakan sistem reimburse.</li> <li>2. Terjadinya perubahan prioritas kegiatan sehingga realisasi TUP tidak sama dengan pengajuan TUP</li> <li>3. Masih adanya gap realisasi dan perencanaan anggaran karena kurang cermat dalam menyusun RPD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi lebih intensif dengan pihak yang menangani pengelolaan kas yaitu antara BPP, BP dan PPSPM.</li> <li>2. Monev intensif terhadap realisasi anggaran</li> <li>3. Revisi RPD setiap akhir triwulan</li> <li>4. Koordinasi dan monev intensif antara seluruh pengelola keuangan dalam melaksanakan pertanggungjawaban TUP</li> </ol>	TW 4 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monev intensif terhadap realisasi anggaran</li> <li>2. Revisi RPD setiap akhir triwulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi lebih intensif dengan pihak yang menangani pengelolaan kas yaitu antara BPP, BP dan PPSPM.</li> <li>2. Koordinasi dan monev intensif antara seluruh pengelola keuangan dalam melaksanakan pertanggungjawaban TUP</li> </ol>	TW 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua transaksi kas tercatat dengan baik dan transparan melalui CMS, memastikan pengelolaan kas yang lebih akuntabel dan efisien.</li> <li>2. TUP dikelola dengan lebih tepat dan sesuai dengan pengajuan</li> <li>3. Realisasi Anggaran yang Sesuai dengan RPD</li> </ol>

No	Indikator	TRIWULAN III							
		Kondisi Awal	Kendala/hambatan/ justifikasi	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi			
						Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
25	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Capaian kinerja diukur diakhir tahun	Penentuan risiko yang diangkat di level BPOM	1. Pembahasan risiko dengan Deputy 2. Pembahasan risiko dengan internal tim SPI	TW IV	Reviu daftar risiko semester 2 tanggal 19 Agustus 2025	Persiapan Audit Manajemen Risiko	TW IV	Tercapainya target indikator kinerja pada akhir tahun berjalan

3. Matriks Rencana Aksi atas capaian Program/Kegiatan Triwulan III (link <https://bit.ly/TindakLanjutCapaianKinerjaDitwasOTSK>)

No.	Program/Kegiatan	TRIWULAN III							
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode III	Progres rencana aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1	3165. BDC Pemantauan produk	9300	3500	38%					
2	3165. BKB Pemantauan produk	1		0.00%					
3	DR. 4119 Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan								
3.1	4119.BAH.001 Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	5210	4,047	49,60%	Jumlah permohonan yang terus meningkat dan jumlahnya tidak dapat dikendalikan karena layanan publik tetap harus dilaksanakan. Efisiensi anggaran yang membatasi untuk melakukan inspeksi langsung	penyelesaian dokumen permohonan Sertifikasi dan SKI/SKE	1. penyelesaian dokumen permohonan Sertifikasi dan SKE/SKE/SAS sd TW III 2. Forum Konsultasi Publik 3 Pelatihan Pelayanan Publik telah dilaksanakan	Penyelesaian dokumen evaluasi IV	TW IV
3.2	4119.BDI.001 Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	16	0	0.00%	Anggaran terblokir keseluruhanya				
3.3	4119.BDI.002 Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	16	0	0.00%	Anggaran terblokir keseluruhanya				
3.4	4119.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	1743	1,667	44.61%	Terjadi efisiensi anggaran, pada tahun 2025 terdapat pembatasan surat edaran deputi terkait kategorisasi temuan iklan dan penandaan yaitu TMK minor harus ditindaklanjuti, sehingga meningkatkan jumlah	1. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha 2. Surat perintah kepada UPT untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang memproduksi OBA TMS mikroba dan kadar air.	1. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha pada 9 Mei 2025 dan 17 Juni 2025 2. Bimbingan teknis identifikasi root cause dan	Evaluasi tindak lanjut hasil TMK atau TMS III	sd twIV

No.	Program/Kegiatan	TRIWULAN III							
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode III	Progres rencana aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
					TMK yang harus ditindaklanjuti		penyusunan CAPA kepada pelaku usaha 3. Evaluasi tindak lanjut hasil TMK atau TMS SD tw II		
3.5	4119.BIC.001 UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	12	3	11.00%	Tidak ada kendala sebagian besar anggaran terblokr				
3.6	4119.BIC.002 keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	350	313	38.11%	Koordinasi dengan lintas sektor lebih ditingkatkan agar tindak lanjut oleh pemangku kepentingan juga menjadi lebih responsif	Koordinasi kepada pemangku kepentingan sudah dilakukan secara informal agar rekomendasi BPOM dapat segera ditindaklanjuti	1. Koordinasi kepada pemangku kepentingan sudah dilakukan secara informal agar rekomendasi BPOM dapat segera ditindaklanjuti 2. Forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk dapat membahas tantangan pengawasan	Forum koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk dapat membahas tantangan pengawasan	TW IV
3.7	4119.QDG.001 Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	7	0	0.00%	Anggaran terblokir keseluruhanya				
3.8	4119.QDG.002 Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka	4	0	0.00%	Anggaran terblokir keseluruhanya				

No.	Program/Kegiatan	TRIWULAN III								
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode III	Progres rencana aksi			
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
3.9	4119.QDG.003 Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	149	0	0.00%	Anggaran terblokir keseluruhanya					
<b>4</b>	<b>DR. 4121 Pengawasan Kosmetik</b>									
4.1	4121.BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	11114	11299	63.86%	Jumlah permohonan yang terus meningkat dan tidak dapat dikendalikan jumlahnya. adanya efiesnsi anggaran	Melaksanakan audit sertifikasi sarana dan evaluasi permohonan sertifikasi produk. Peningkatan kompetensi bagi petugas dan pelaku usaha	Melakukan bimtek kepada pelaku usaha dengan bekerja sama dengan asosiasi di Bandung pada bulan juni 2025	Melaksanakan audit sertifikasi CPKb Melakukan monitoring terkait timeline pengajuan sertifikasi		TW 2 - TW 4
4.2	4121.BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	1166	988	32.81%	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan prioritas tidak dapat terlaksana. anggaran yang tersedia hanya untuk kegiatan pemeriksaan rutin dan intensifikasi pengawasan	Melaksanakan intensifikasi pengawasan	Melaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik di Balikpapan pada bulan juni 2025, melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan FGD terkait risiko penggunaan kosmetik yang diaplikasikan selayaknya obat Melakukan monev dan tindak lanjut terkait pengaduan influencer Melaksanakan	Melakukan monev tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik		TW 2 - TW 4

No.	Program/Kegiatan	TRIWULAN III								
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode III	Progres rencana aksi			
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
								kegiatan Etiket biru bekerjasama dengan stakeholder terkait		
4.3	4121.BIC.001 Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	100	0	0.00%	Anggaran terblokir sepenuhnya					
4.4	4121.BIC.002 Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	15	0	0.00%	Anggaran terblokir sepenuhnya					
4.5	4121.QDI.001 Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	35	0	0.00%	Anggaran terblokir sepenuhnya					
4.6	4121.QDI.002 BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	75	0	0.00%	Anggaran terblokir sepenuhnya					
<b>5</b>	<b>DR. 4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>									
5.1	4128.BAH.001 Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	6	5	83.93%	Adanya revisi DIPA sehingga pelaksanaan kegiatan penyempurnaan registrasi berbasis online baru dapat dilaksanakan pada TW IV	1. Pengelolaan pengaduan TW III 2. Peningkatan kompetensi SDM Evaluator Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan 3. Pelaksanaan penyempurnaan aplikasi registrasi berbasis online	1. Melaksanakan kegiatan FKP Standar Pelayanan Publik 2025 2. Pengelolaan pengaduan TW III 3. Peningkatan kompetensi SDM Evaluator Obat Bahan	1. Pengelolaan pengaduan TW IV 2. Pelaksanaan penyempurnaan aplikasi registrasi berbasis online		TW IV

No.	Program/Kegiatan	TRIWULAN III							
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode III	Progres rencana aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
						Alam, Suplemen Kesehatan, Auditor DIP Kosmetik, dan Evaluator Notifikasi Kosmetik, serta Penilaian Uji Pratiklinik/Klinik OBA dan SK 4. Finalisasi survey analisis dampak inovasi pelayanan publik			
5.2	4128.BIA.001 Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	1200	809	67.42%	Efisiensi anggaran menyebabkan terhambatnya audit <i>on site</i> yang berdampak pada audit DIP yang berkepanjangan dan adanya revisi DIPA sehingga kegiatan audit DIP <i>on site</i> baru dapat dilaksanakan pada TW IV	1. Desk konsultasi penilaian DIP Kosmetik 3. Bimbingan teknis penyusunan DIP melalui program INCHARGE dan SINERGI di Jakarta dan Jawa Barat	1. Telah dilaksanakan kegiatan INCHARGE pada tanggal 30 Juli dan 26 Agustus di Jakarta, serta 25 - 26 September 2025 di Yogyakarta 2. Telah dilaksanakan kegiatan SINERGI pada tanggal 22 Agustus dan 11 September 2025	1. Intensifikasi audit DIP secara <i>onsite</i> 2. Bimbingan teknis penyusunan DIP melalui program Sinergi	TW IV

No.	Program/Kegiatan	TRIWULAN III							
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode III	Progres rencana aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
5.3	4128.PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	81000	90645	76.00%	Adanya tambahan data berulang sehingga persetujuan registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tertunda	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA dan SK, serta Notifikasi Kosmetik 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program <i>zero stock/ stock opname/ crash program</i>	Telah dilaksanakan <i>crash program</i> sebanyak 2 kali dalam seminggu dan intensifikasi desk registrasi produk dan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik secara daring dan luring	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA dan SK, serta Notifikasi Kosmetik 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program <i>zero stock/ stock opname/ crash program</i> sebanyak 1 kali dalam seminggu	TW IV
5.4	4128.QDB.001 Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	3340	3329	73.66%	Perbedaan latar belakang dan jangkauan wilayah pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik	1. Meningkatkan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal, misalnya asosiasi pelaku usaha 2. Pelaksanaan OSS Registrasi OBA, SK, dan Kos secara jemput bola luring dan daring	Telah dilaksanakan kegiatan PROAKSI BERPADU di Surabaya dan Yogyakarta, webinar RUBIK (Ruang Bimbingan Notifikasi Kosmetik), serta EKSPRESI (Edukasi Seputar Registrasi) tentang Uji Toksisitas Akut, Tips Penyusunan DIP, dan Notifikasi Kosmetik Industri Golongan B. Selain itu, juga dilaksanakan	1. Meningkatkan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal, misalnya asosiasi pelaku usaha 2. Pelaksanaan OSS Registrasi OBA, SK, dan Kos secara jemput bola luring dan daring	TW IV



No.	Program/Kegiatan	TRIWULAN III							
		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW sebelumnya dan/atau TW Periode III	Progres rencana aksi		
							Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	
		Rencana aksi yang belum selesai		Timeline					
6.1	4129.ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	104	123	100.00%	Realisasi TW II hampir mencapai target tahunan, akan dilakukan revisi output pada TW III / IV	-	-	-	TW IV
6.2	4129.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	18	31	100.00%	Proses pengadaan telah selesai	Pengadaan akan diselesaikan di TW II	proses pengadaan	-	-
6.3	4129.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	69	69	100.00%	Proses pengadaan telah selesai	Pengadaan akan diselesaikan di TW II	proses pengadaan	-	-
6.4	4129.PFA.001 Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	7	1	79.00%	rata-rata progres telah mencapai 79%	Melanjutkan progres penyusunan di TW III dan IV	-	-	TW IV
6.5	4129.PFA.002 Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	1	0	0.00%	Kegiatan tidak terlaksana karena seluruh anggaran terblokir	-	-	-	TW IV
7	<b>DR. 6385 PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>								
7.1	6385.BAH.001 Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	1	0	81.00%	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran				
7.2	6385.BDC.001 Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	200	100	70.00%	Tidak ada kendala dan hambatan				
7.3	6385.QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	115	65	67.05%	Tidak ada kendala dan hambatan				
7.4	6385.UBA.002 Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	10	0	0.00%	Kegiatan tidak dilaksanakan sehubungan dengan efisiensi anggaran				



**Lampiran. Notulen/ Undangan/Daftar Hadir dan Dokumentasi**

**NOTULA**

Nama Kegiatan: Rapat Monev Kedeputian 2  
 Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2025  
 Jam : 09.30 - selesai WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Deputi 2  
 Pimpinan Rapat: : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
 Agenda : 1. SPIP (PIC: PMPU)  
 2. Monev Kinerja dan Anggaran (PIC: WasOTSK)  
 3. Sistem Mutu (PIC: Standard)  
 4. SAKIP (PIC: WasKos)  
 5. Penyusunan Laporan Kinerja (PIC: Standard)  
 6. PIPK (PIC: PMPU)  
 7. RB (PIC: Reg)  
 Hasil Pembahasan :

No.	Topik Pembahasan	Uraian
1	Arahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan & Kosmetik.	1. Apresiasi
2	SPIP (PIC: Dit. PMPU OT, SK dan Kosmetik)	1. 3 komponen utama penilaian SPIP Terintegrasi, a.l: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan. 2. 4 parameter penilaian, yaitu: level SPIP, Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta level Kapabilitas APIP. 3. Penilaian maturitas SPIP 2025 periode 1 Juli 2024-30 Juni 2025 4. Deadline pengisian Kertas Kerja dan pemenuhan data dukung: 5 Juni 2025 Kertas Kerja Tahun 2025: <a href="https://bit.ly/KertasKerjaPMSPIPT2025">https://bit.ly/KertasKerjaPMSPIPT2025</a> Daduk PM: <a href="http://bit.ly/DadukSPIPTBPOM2025">http://bit.ly/DadukSPIPTBPOM2025</a>
	Diskusi	Arahan Deputi: 1. Agar diperhatikan deadline pengisian Kertas Kerja dan Pemenuhan Data Dukung oleh tim SPIP Agar dapat ditingkatkan nilai Manajemen Risiko Dep 2. Manrisk merupakan salah satu unsur penilaian SPIP
3	Monev Kinerja dan Anggaran (PIC: Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan)	1. Hasil penilaian SAKIP dari tahun 2022 - 2024 2. Evaluasi kegiatan SAKIP Mei 2025 Perbaikan Terhadap kelemahan, direkomendasikan kepada Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yaitu : ➤ Seluruh rekomendasi hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya ➤ Keselerasan penyajian data antar seluruh Dokumen perencanaan target) ➤ Ketersediaan Sumber Data capaian kinerja yang dapat tertelusuri ➤ Progres Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan implementasi SA</li> <li>➤ Mempublikasikan seluruh Dokumen SAKIP pada Subsite ma</li> </ul> <p>3. Agenda SAKIP bulan juni untuk menyiapkan data dukung m kertas kerja penetapan target deputy 2025 - 2029</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan pada pertemuan berikutnya di breakdown apa yan</li> <li>pembandingan dengan ke deputian lain, KL lain dengan tahun</li> <li>2. Dibuat Trennya dan dimasukkan kedalam PPT pada bulan Ju</li> <li>3. Hasil penilaian SAKIP Tahun 2024 80,66%, pada Tahun 20</li> </ol>
	Diskusi	
4	Sistem Mutu (PIC: Dit. Standardisasi OT, SK dan Kosmetik)	
	Diskusi	
5	SAKIP (PIC: Dit. Pengawasan Kosmetik)	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hasil penilaian SAKIP dari tahun 2022 - 2024</li> <li>5. Evaluasi kegiatan SAKIP Mei 2025</li> </ol> <p>Perbaikan Terhadap kelemahan, direkomendasikan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Seluruh rekomendasi hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti</li> <li>➤ Keseluruhan penyajian data antar seluruh Dokumen perencanaan dan Monev (realisasi dan target)</li> <li>➤ Ketersediaan Sumber Data capaian kinerja yang dapat tertelusur</li> <li>➤ Progres Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya</li> <li>➤ Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan implementasi SAKIP (Proses Perencanaan dan Monev)</li> <li>➤ Mempublikasikan seluruh Dokumen SAKIP pada Subsite masing-masing unit.</li> </ul> <p>Agenda SAKIP bulan juni untuk menyiapkan data dukung manual iku deputy 2025 - 2029 dan kertas kerja penetapan target deputy 2025 - 2029</p>
	Diskusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Paparan pada pertemuan berikutnya di breakdown apa yang masih perlu diperbaiki, ambil pembandingan dengan ke deputian lain, KL lain dengan tahun sebelumnya</li> <li>5. Dibuat Trennya dan dimasukkan kedalam PPT pada bulan Juli</li> </ol>

		Hasil penilaian SAKIP Tahun 2024 80,66%, pada Tahun 2025 diusahakan untuk naik ke 85%
6	Penyusunan Laporan Kinerja (PIC: Dit. Standardisasi OT, SK dan Kosmetik)	
	Diskusi	
7	PIPK (PIC: Dit. PMPU OT, SK dan Kosmetik)	1. terhadap temuan BPK a. meminimalisir uang tunai
	Diskusi	
8	RB (PIC: Dit. Registrasi OT, SK dan Kosmetik)	1. Direktorat Pengawasan OTSK dan Direktorat registrasi OTSK dan Kos tidak dapat masuk dalam penilaian WBBM oleh Kemenpan karena Tidak Memenuhi Syarat karena nilai capaian kinerja lebih baik < 3.75% 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik telah menyiapkan persiapan untuk penilaian WBBM 3. Direktorat PMPU OTSKKos telah menyiapkan persiapan untuk penilaian WBK mandiri
	Diskusi	Dipastikan ke Inspektorat definisi capaian lebih baik didapat dari definisi peraturan yang dituju, karena di Per Menpan no 90 tahun 2021, definisinya berbeda dengan yang ada pada KepKa 289 tahun 2024
9	Arahan Deputi	1. Terdapat capaian yang melebihi target seperti "persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu" (126%), oleh karena itu perlu pertemuan intens dengan UPT setiap bulan agar dapat dievaluasi sebaran samplingnya. 2. terdapat UPT yang belum melaporkan maka perlu dibuatkan surat

## 1. Undangan



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Jakarta, 3 Juli 2025

Nomor : HM.04.03.4.07.25.81  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik
5. Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
6. PFM Ahli Utama

Bersama ini, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Juli yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 7 Juli 2025  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Deputy 2  
Gedung Garuda Lt. 2  
Pimpinan Rapat : Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  
Agenda : Pembahasan SPIP, Monev Kinerja dan Anggaran, Sistem Mutu, SAKIP, Penyusunan Laporan Kinerja, PIPK, dan RB

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



















Mohamad Kashuri














## 2. Dokumentasi



### 3. Daftar Hadir

**DAFTAR HADIR**  
**Rapat Monitoring dan Evaluasi Kedeputian 2**  
**Jakarta, 7 Juli 2025**

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Instansi / Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Mohamad Karhuni	L	Deputi 2	
2	Shandi Gungadi	L	Biro Umum	
3	Ardiyansyah K.	L	Biro Umum	
4	Sartika K	P	Biro Umum	
5	Rusli T.	L	Biro Umum	
6	Tsamirah	L	Dit. Cegah Tangkal	
7	Pranita F.	P	Dit. Standard	
8	Anggun	P	Biro Umum	
9	Randi Hari Putra	L	Ditreg OT SK Kor	
10	Nurfitri	P	-.-	
11	Atri Oktarina	P	-.-	
12	Pulan Wedyananti	P	Dit PMPU OTSKU	
13	Widha Dianasari	P	Dit PMPU OTSKK	
14	Iga Farida	P	Dit PMPU OTSKU	
15	Wlwl Hartuti	P	Dit PMPU OTSKK	
16	Ambar Setyaningrum	P	DA PMPU OTSKK	

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Instansi / Unit Kerja	Tanda Tangan
17	Kristyawon	L	DIT was was	
18	Meyla NURWITASARI	P	DIT was OTSK	
19	Mellia Rahmi	P	—	
20	Puspita Ayu W	P	—	
21	Alfina Nur F	P	Dit. Std OTSKK	
22	Lies S	P	—	
23	Pati Eka Sutarya D	P	—	
24	Tepy Usia.	L	Dit Reg OT sblu	
25	Dhan Putri	P	Dit Std OTSKK	
26	Rostyawati	P	Ditwas OTSK	
27	Nurulka W	P	DIT PUPROTEK	
28	Anisyal	P	DIT Reg OTSKK	
29	Ruslan	L	Ditwas OTSK	
30				
31				
32				
33				
34				

